

Peran Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai di Ampiang Parak Pesisir Selatan

Rani Saputri, Henni Muchtar

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

E-mail: rsaputri537@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kelompok masyarakat pengawas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL), kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat LPPL untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat pengawas LPPL dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak sudah cukup berperan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan peran mengelola wilayah pesisir pantai kelompok masyarakat pengawas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan mempunyai kendala diantaranya adalah dana yang dimiliki masih minim, kualitas sumber daya manusia masih rendah, partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai Ampiang Parak masih kurang, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan pantai. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat pengawas LPPL untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan peran mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak adalah pembinaan, sosialisasi, pelatihan, memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Kata Kunci: pokmaswas, laskar pemuda peduli lingkungan, wilayah pesisir pantai

ABSTRACT

The research aims to describe the role of community supervision of the Youth Force Care Environment (LPPL), constraints in the implementation of its role, and efforts undertaken by the local Government and the community supervision LPPL to overcome the constraints in the implementation of its role in managing coastal areas in Ampiang Parak. This research is a qualitative descriptive study with observation techniques, interviews, and documentation. Data types and data sources use primary and secondary data. The results showed that the community supervision group of LPPL in the coastal area management in Ampiang Parak has quite a good role in the planning, implementation, and supervision stages. However, in the implementation of the role of managing coastal areas of community

watchdog group of Warriors Youth Care Environment has a constraint between them is still minimal funds, quality of human resources is still low, participation community in the activities of saving the beach environment Ampiang interspace still lacking, and lack of support facilities and infrastructure available for the management of coastal activities. The efforts undertaken by the local Government and the community supervision group of LPPL to overcome the constraints in implementing the role of managing coastal areas in Ampiang Parak is the construction, socialization, training, provide assistance in funds and facilities and infrastructure needed.

Keywords : pokmaswas, youth warriors care environment, coastal area



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2019 by author and Universitas Negeri Padang.

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas perairan laut mencapai 186.500 km² dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km, serta mempunyai 185 buah pulau-pulau kecil, sehingga memiliki kekayaan sumber daya alam dari laut seperti beraneka jenis ikan, rumput laut, udang, kepiting, mutiara, padang lamun, coral reef (terumbu karang), estuari, dan biota laut lainnya. Dengan kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir pantai, hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan ekonomi yang berasal dari kegiatan perikanan, pariwisata, dan transportasi. Namun, di sisi lain dapat memberikan dampak negatif dari adanya kegiatan-kegiatan tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada fungsi ekosistem di laut dan di darat. Selain itu abrasi pantai juga menjadi penyebab kerusakan di sekitar bibir pantai. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal sekitar pantai dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai agar dapat meminimalisir kerusakan pada wilayah pesisir pantai.

Salah satu wilayah pesisir pantai yang dikelola oleh masyarakat adalah Pantai Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Ampiang Parak sebelumnya merupakan pantai yang tandus, gersang dan sering terjadinya abrasi pantai. Karena kondisi tersebut, maka masyarakat setempat berinisiatif untuk mengelola kawasan pantai tetap lestari dan ingin melindungi pantai dari kerusakan dengan menanam pohon cemara di sepanjang pantai ampiang parak dengan jumlah 3.300 tanaman dan menanam mangrove 35.000 batang pohon. Masyarakat tersebut aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai maka harus tergabung dalam suatu organisasi yang disebut pokmaswas. Sehingga, terbentuklah Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) pada tahun 2013 dibawah naungan Wali Nagari Ampiang Parak, Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan BPSPL Padang.

Menurut Soemarwoto (2004: 76) menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan yang bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki mutu

lingkungan agar kebutuhan pokok makhluk hidup dapat terpenuhi. Menurut Dahuri et al. (dalam Rangkuti, dkk, 2017: 8) menjelaskan bahwa pesisir merupakan kawasan pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi didarat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Sedangkan definisi pantai menurut Rangkuti, Ahmad Muhtadi, dkk (2017: 8) pantai merupakan bagian dari kawasan pesisir yang perairannya masih terpengaruh oleh aktivitas darat dan laut. Jadi, Pengelolaan wilayah pesisir pantai merupakan pengelolaan kegiatan oleh manusia dalam rangka melindungi sumber daya alam wilayah pesisir pantai (sumber daya hayati dan non hayati) dan melindungi manusia dari resiko bencana alam seperti tsunami guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Siregar (2014) menyatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengurangan polusi atau pencemaran laut di tepi pantai salah satunya dalam bentuk kontrol terhadap lingkungan pantai yang berkaitan dengan limbah. Selain itu dengan mengawasi, menegur, dan bekerjasama dalam menanggulangi sampah. Nawawi (2013) menyebutkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok

dengan mendirikan Koperasi Wisata Wina Bahari 45 Pantai Depok. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, pembuangan limbah cair, daur ulang sampah, pengadaan air bersih, dan evaluasi lingkungan, serta bertanggung jawab atas keamanan Pantai Depok. Pratiwi (2017) menjelaskan bahwa kegiatan pengelolaan pariwisata di desa wisata Kampung Pitu melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat lokal. Siahaya, dkk (2018) dengan judul Partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi mangrove di wilayah tarakan Kalimantan Utara menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan mangrove sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan daerah pesisir. Selanjutnya oleh Sucipta, M.A & Solihin, S (2017) berjudul Pengelolaan Pantai Kedonganan sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Berbasis Masyarakat di Desa Kedonganan menerangkan bahwa pengelolaan pantai Kedonganan yang melibatkan masyarakat memberikan dampak positif seperti terjadi peningkatan ekonomi, sosial budaya yang signifikan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian sebelumnya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan pengurangan polusi atau pencemaran laut di tepi pantai. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih fokus pada peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan peran Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam

pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu bertujuan agar dapat memberikan gambaran dan deskripsi mengenai suatu masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau menggambarkan suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Soehartono, 2008:35). Penelitian ini memfokuskan pada peran Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Lokasi penelitian adalah nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Kasubag Dokumentasi dan Humas di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Ampiang Parak, Wali Kampung, 7 orang Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL), dan 3 orang masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Ampiang Parak dilakukan 3-5 kali dalam setahun. Adapun usulan perencanaan program kerja yang dibuat oleh pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan meliputi: (1) mengkonsepkan paket kunjungan, meliputi paket edukasi tentang penyusut dan paket edukasi terkait pengurangan resiko, (2) merencanakan kawasan pantai ampiang parak sebagai kawasan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana, (3) menyiapkan bibit cemara laut dan mangrove untuk kegiatan mitigasi bencana, (4) merencanakan pembuatan tracking mangrove, (5) mengusulkan kegiatan snorkeling dan diving, (6) mempersiapkan kegiatan penyelaman akses bangkai kapal belanda yang karang abad 1801, (7) merancang pembuatan sarana dan prasarana, seperti menara pantau, pos jaga, dan menara air bersih, (8) menyiapkan kebutuhan peralatan pengawasan, baik pengawasan di laut maupun di pantai.

Pada tahap pelaksanaan ini, ada beberapa perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) diantaranya dengan memberikan edukasi ke masyarakat baik itu siswa,

mahasiswa, ataupun masyarakat umum tentang penyu.

Perannya dalam memberikan edukasi tentang penyu meliputi memberitahukan dan menjelaskan kepada masyarakat baik itu siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum untuk tidak mengambil telur penyu karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan membudidayakan/ melestarikan/ melindungi penyu agar dapat dikembangkan dan tidak punah karena penyu merupakan salah satu jenis hewan yang dilindungi di kawasan pantai Ampiang Parak.

Pelayanan dalam memberikan edukasi (pendidikan) tentang penyu menggunakan paket kunjungan seperti sekelompok siswa atau mahasiswa harus mendaftar dulu ke anggota Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) dengan membawa surat resmi dari instansi atau sekolah sehingga dihari kedatangan anggota LPPL dapat menyiapkan materi yang akan diberikan tentang penyu dan menunjukan salah satu anggota untuk mendampingi menjelaskan dan menyampaikan ke seluruh siswa/ masyarakat mengenai kegiatan apa saja yang ada di konservasi penyu ampiang parak kemudian dibawa ke sebrang. Namun, jika yang datang hanya satu atau dua orang, masyarakat bisa membaca sendiri media informasi secara umum yang telah disiapkan.

Kegiatan memberikan edukasi tentang penyu ke berbagai masyarakat baik siswa, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang pernah dilakukan oleh Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) yaitu pada Sabtu 27 Juli 2019 pukul 12.00-16.00 dari instansi Kemendes

Pekan Baru berjumlah 60 orang dan petugas yang memberikan edukasi adalah Sepriadi. Pada Kamis, 11 April 2019 pukul 12.00-16.00 dari instansi SMA Negeri 1 Sungai Penuh berjumlah 30 orang peserta didik dan petugas yang memberikan edukasi adalah Sepriadi. Pada Sabtu, 20 April 2019 pukul 12.00-14.30 dari instansi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Pesisir Selatan Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas berjumlah 60 orang peserta didik dan petugas yang memberikan edukasi adalah Novendra Aryanto (Sumber: Dokumen Penelitian 2019).

Selanjutnya ada mitigasi bencana dengan penanaman mangrove dan cemara laut di sekitar pantai ampiang parak. Kegiatan mitigasi bencana seperti penanaman mangrove dan cemara laut tidak dilakukan setiap tahun karena penanaman ini dilakukan jika ada bantuan yang diberikan baik itu pemerintah maupun NGO. Kegiatan mitigasi bencana dengan penanaman mangrove dan cemara memberikan manfaat yaitu melindungi pantai dari abrasi air laut, menghasilkan banyak ikan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, melestarikan ekosistem di pantai, serta dapat mengurangi resiko bencana tsunami.

Gambar 1

Penanaman bibit mangrove oleh anggota LPPL bersama Tim Penanggulangan bencana nagari Amping parak, perwakilan dari masing-masing instansi dan masyarakat



Selanjutnya melakukan pembersihan pantai dari sampah plastik sangat diperlukan agar pantai ampiang parak kebersihannya terjaga, terawat, dan tidak merusak kawasan ekosistem laut dan muara. Kegiatan pembersihan pantai oleh anggota pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dilakukan tanpa adanya jadwal dan secara mandiri sudah membersihkan pantai tanpa disuruh oleh ketua. Pembersihan pantai dilakukan anggota kelompok tergantung datangnya pengunjung, artinya jika pengunjung ramai setiap hari maka dilakukan pembersihan pantai tetapi jika pengunjung tidak ada maka tidak dilakukan. Biasanya pantai ampiang parak ramai dikunjungi oleh masyarakat pada hari sabtu dan minggu sehingga anggota pada hari tersebut selalu membersihkan pantai dari sampah plastik.

Kegiatan selanjutnya dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola pantai Ampiang Parak. Anggota kelompok mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam kegiatan penyelamatan lingkungan, misalnya melindungi hewan langka dari kepunahan seperti penyu dengan tidak mengambil dan memperjualbelikan telur penyu, masyarakat boleh ikut serta dalam kegiatan patroli malam, penanaman mangrove dan cemara, membersihkan pantai, serta melaporkan kepada

pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan jika masyarakat melihat ada oknum tertentu mengambil dan memperjualbelikan telur penyu, melihat nelayan mengambil ikan menggunakan pukot harimau.

Kemudian ada kegiatan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Adapun berbagai kegiatan pengawasan di pantai Ampiang Parak meliputi pengawasan terhadap tanaman mangrove dan cemara, serta pengawasan terhadap telur penyu. Pengawasan di laut yaitu mengawasi gerak-gerik masyarakat yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti merusak dengan cara membom terumbu karang, menangkap ikan menggunakan pukot harimau atau jaring hijau menggunakan teropong. Jika menemukan pelanggaran seperti ada nelayan yang ingin membom terumbu karang atau menangkap ikan menggunakan pukot harimau maka pengawas melaporkan kepada aparat yang berwenang seperti Polsek setempat.

Pada saat melakukan pengawasan di pantai menemukan kerusakan pada pohon cemara laut akibat terkikis oleh abrasi air laut melakukan pelaporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan keadaan dan situasi di kawasan pantai berdasarkan dokumen foto pohon cemara laut yang rusak itu dan hasil pencatatan oleh anggota. Selain itu, setiap tanaman mangrove yang rusak maupun mati akan di sampaikan oleh ketua kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan ASB Jerman.

Berdasarkan formulir Laporan Pengawasan Mangrove Periode Tahun 2015–2019, pada tahun 2015 melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan memagar setiap blok menggunakan waring, temuan: tidak ada kerusakan akibat alam dan hewan. Tahun 2016 melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan memaksimalkan fungsi pagar blok, temuan : kerusakan akibat alam (terdapat 15.000 dilanda abrasi 4 blok). Pada tahun 2017 melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan pembasmian hama, temuan: kerusakan akibat hewan berjumlah 50 batang. Tahun 2018 melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan membersihkan sampah di mangrove, temuan: kerusakan akibat hewan berjumlah 50 batang. Tahun 2019 melakukan perawatan dan pemeliharaan dengan pengecekan daun mangrove, temuan : tidak ada kerusakan akibat alam dan hewan (Sumber: Dokumen Profil Laskar Pemuda Peduli Lingkungan).

Peran Pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/ Permen-KP/ 2014 dalam Pasal 4 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjelaskan bahwa terdapat tiga peran meliputi pertama tahap perencanaan. Pada tahap ini Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan memiliki banyak usulan kepada pihak terkait yaitu pemerintah yang bersangkutan seperti di tingkat nagari yaitu Wali Nagari, tingkat

provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan tingkat kabupaten yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Usulan-usulan yang di rencanakan oleh pokmaswas tersebut berkaitan dengan bentuk kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir pantai.

Kedua tahap pelaksanaan. Pada tahap ini Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan telah melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan keberadaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga, memelihara dan serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga tahap pengawasan anggota pokmaswa laskar pemuda peduli lingkungan telah melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pencatatan yang dilakukan secara rutin.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan peran mengelola wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan

a. Bantuan dana yang diberikan oleh sumber dana masih minim

Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti BPSPL (Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan laut) Padang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, PSDKP (Pengawasan Sumber Daya

Kelautan Perikanan), KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) dan perusahaan seperti PLN. Bantuan dari pemerintah maupun institusi berupa sarana, prasarana, peralatan, maupun uang belum mencukupi dalam pengelolaan di wilayah pesisir pantai Ampiang Parak.

Berdasarkan data dokumen pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan pesisir pantai Ampiang Parak berjumlah Rp 1.853.400.000,- (satu miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sementara dana yang diperoleh dari hasil jasa pengangkutan pada tahun tahun 2019 (Januari - Juli) berjumlah Rp 126.000.000,- sehingga kekurangan dana berjumlah Rp 1.727.400.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dapat disimpulkan bahwa kekurangan dana dalam pengelolaan pesisir pantai Ampiang Parak masih sangat banyak. Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) tidak bisa menutupi kekurangan dana tersebut sehingga dalam pelaksanaan perannya kurang optimal.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Anggota Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) berjumlah 15 orang dan pendidikan terakhir anggota masih ada yang hanya tamat SD dengan jumlah 5 orang, SMA berjumlah 7 orang, sedangkan SMAK (Sekolah Menengah Analisis Kesehatan), STM dan sarjana berjumlah 1 orang. Jika dilihat dari pendidikan terakhir anggota Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan yang tidak ada lulusan dari sekolah kelautan atau perikanan,

hal ini berarti anggota tersebut belum mempunyai pengalaman dengan pekerjaan yang sedang diikutinya sehingga mengakibatkan penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan dan perikanan masih terbatas.

c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak masih kurang

Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam melakukan suatu kegiatan. Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan selalu mengajak masyarakat di sekitar pantai Ampiang Parak untuk ikutserta dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak, seperti penanaman mangrove, penanaman cemara, menjaga kebersihan pantai, dan melindungi penyu. Namun, tidak semua masyarakat ikut serta dan hanya sebagian ikutserta dalam kegiatan penyelamatan lingkungan pantai ampiang parak bersama dengan pokmaswas LPPL.

Masih banyaknya masyarakat yang kurang berminat untuk mengikuti kegiatan penyelamatan lingkungan pantai Ampiang Parak disebabkan oleh pertama, masyarakat itu sendiri yang tidak tertarik dengan kegiatan sosial/ lingkungan dan beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak menguntungkan sama sekali secara ekonomi karena tidak ada imbalan yang diperoleh masyarakat. Kedua, masyarakat tidak mau dilarang untuk tidak mengambil dan menjual telur penyu karena mereka akan merasa rugi jika mengikuti aturan tersebut.

d. Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia

Di kawasan konservasi penyu pantai Ampiang Parak telah memiliki beberapa sarana dan prasarana. Namun, sarana dan prasarana yang ada baru untuk kebutuhan dasar yang digunakan sebagai pariwisata. Sedangkan, untuk kebutuhan di lapangan dalam rangka melaksanakan perannya belum ada. Kelompok masih kekurangan sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional dilapangan sehingga Pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan terkendala melakukan pengawasan di laut. Pengawasan di laut tidak bisa dilakukan sendirian oleh kelompok dikarenakan tidak adanya kapal patroli yang memadai untuk pergi ke tengah laut agar anggota lebih mudah memantau apakah ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum tertentu seperti menangkap ikan dengan pukat harimau, jaring hijau, dan membom terumbu karang. Saat ini kelompok hanya bisa memantau melalui alat teropong dari pantai. Karena keterbatasan itu kalau melakukan pengawasan ke tengah laut harus bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan Sumatera Barat.

Menurut Dahuri, dkk (2001:262), salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan adalah lemahnya kemampuan aparatur dan kelembagaan dalam mengelola sumber daya kelautan secara lestari. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa kualitas sumber daya manusia masih rendah menjadi salah satu kendala Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam pelaksanaan perannya mengelola Pantai Ampiang

Parak yaitu tidak semua anggota bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyu disebabkan kurangnya keterampilan dalam menjelaskan suatu materi tentang penyu.

Upaya pemerintah daerah untuk mengatasi kendala- kendala tersebut diantaranya dengan Pelatihan dan Sosialisasi. Pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pernah diberikan kepada anggota pokmaswas LPPL. Adapun pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan provinsi Sumatera Barat, BPSPL Padang, Dinas Pariwisata, Dinas Kantor Perpustakaan Daerah. pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Kantor Perpustakaan Daerah bermacam-macam. Dimulai dari bagaimana cara vegetasi, rehabilitasi terumbu karang, kegiatan sosialisasi perlindungan penyu dan terumbu karang, cara penangkapan ikan yang baik, pengelolaan pariwisata, pengelolaan taman baca nagari, cara mengabadikan film/ video, kuliner dan menyablun. Semua pelatihan dan sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi anggota pokmaswas LPPL untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Gambar 2

Sosialisasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 19 Maret 2019



Sumber : Dokumen Profil Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan

Kemudian memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota Pokmaswas LPPL. Pemerintah sebisa mungkin membantu Pokmaswas agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Bantuan yang pernah diberikan pemerintah ke Pokmaswas LPPL berupa sarana dan prasarana untuk kebutuhan pengelolaan pantai. Selain itu pemerintah juga memfasilitasi (menghubungkan) CSR PLN dengan kelompok tujuannya agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pantai sehingga dapat menjalankan perannya dengan baik. Berdasarkan dokumen LPPL, PLN memberikan dana kepada pokmaswas LPPL pada tahun 2017 sebesar Rp 214.000.000, tahun 2018 sebesar Rp 115.000.000, tahun 2019 sebesar 227.040.059.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyelamatan lingkungan pantai di Ampiang Parak adalah dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang mencari telur penyu di kawasan konservasi penyu Ampiang Parak untuk dijual atau

dikonsumsi dan bagi yang ketahuan menjual dan mengambil telur penyu dengan membuat berita acara. Semua kegiatan kelompok tersebut berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI angkatan laut, kemudian kementerian kelautan, Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya upaya yang dilakukan pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dapat mengantisipasi atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang melawan hukum, seperti masyarakat yang masih melakukan pencarian telur penyu di kawasan pantai Ampiang Parak.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan memiliki peran penting dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai di Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan meliputi tahap perencanaan diantaranya (1) mengonsepkan paket kunjungan, meliputi paket edukasi tentang penyu dan paket edukasi terkait pengurangan resiko, (2) merencanakan kawasan pantai ampiang parak sebagai kawasan ekowisata berbasis pengurangan resiko bencana, (3) menyiapkan bibit cemara laut dan mangrove untuk kegiatan mitigasi bencana, (4) merencanakan pembuatan tracking mangrove, (5) mengusulkan kegiatan snorkeling dan diving, (6) mempersiapkan kegiatan penyelaman akses bangkai kapal belanda yang karang abad 1801, (7) merancang pembuatan sarana dan prasarana, seperti menara pantau, pos jaga, dan

menara air bersih, (8) menyiapkan kebutuhan peralatan pengawasan, baik pengawasan di laut maupun di pantai.

Tahap pelaksanaan diantaranya : (1) memberikan edukasi ke masyarakat baik itu siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum tentang penyus; (2) melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan penanaman mangrove dan cemara laut; (3) melakukan pembersihan pantai dari sampah plastik; (4) mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola pantai Ampiang Parak. Tahap pengawasan diantaranya : pengawasan di laut dan di pantai. Kendala yang dialami Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, bantuan yang diberikan oleh sumber dana masih minim, partisipasi masyarakat masih kurang, serta minimnya sarana dan prasarana.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan Pokmaswas Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) untuk mengatasi kendala kendala dalam pelaksanaan perannya mengelola wilayah pesisir pantai diantaranya adalah pelatihan, sosialisasi, memberikan bantuan dana maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan anggota pokmaswas laskar pemuda peduli lingkungan, serta pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, Rokhmin, dkk. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

- Nawawi, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 103-109.
- Pratiwi, B. D. (2017). Pariwisata dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul). *E-Societas*, 6(8).
- Rangkuti, Ahmad Muhtadi, dkk. 2017. *Ekosistem Pesisir & Laut Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaya, M. E., Salampessy, M. L., Febryano, I. G., Rositah, E., Silamon, R. F., & Ichsan, A. C. (2018). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Konservasi Hutan Mangrove Di Wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. *Jurnal Nusa Sylva*, 16(1), 12-17.
- Siregar, C. N. (2014). Partisipasi Masyarakat dan Nelayan dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut di Kawasan Pantai Manado-Sulawesi Utara. *Jurnal Socioteknologi*, 13(1), 25-33.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sucipta, M. A., & Solihin, S. (2017). Pengelolaan Pantai Kedonganan sebagai Daya Tarik Wisata Kuliner Berbasis Masyarakat di Desa

Kedonganan. SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora [Journal of Social Sciences and Humanities], 3(1), 69.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/ Permen-KP/ 2014 tentang peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.